



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ANALISIS KELESTARIAN SUBAK PASCA DITETAPKAN MENJADI WARISAN BUDAYA DUNIA OLEH UNESCO

MAS'AD, S.Si.





Analisis Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Jenderal
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
2019**

**Analisis Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia
oleh UNESCO**

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud, Gedung C Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Pengarah:

Ir. Siti Sofiah, M.Sc.

Editor:

Dr. Dwi Winanto Hadi, M.Pd.

Penulis:

Mas'ad, S.Si.

Desainer Sampul:

Tri Istiwahyuningsih

Sumber Foto:

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Cetakan pertama, November 2019

ISBN: 978-602-8449-22-9

© 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas selesainya analisis tentang Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Perkembangan pariwisata di daerah Subak bagaikan pisau bermata dua karena perkembangan pariwisata tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Menghindari dampak negatif tersebut, kajian kelestarian Subak menjadi penting untuk dilakukan.

Penulisan analisis "Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO" ini diuraikan secara jelas, antara lain: latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, sistematika penulisan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Subak sebagai warisan budaya Indonesia yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia di era modern ini. Semoga analisis ini nantinya dapat bermanfaat kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan dan mengambil kebijakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan ini sehingga penulisan analisis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kritik dan saran yang menyempurnakan laporan ini diterima dengan hati terbuka.

Jakarta, November 2019
Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.
NIP. 196607301990011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Pertanian bercocok tanam padi di Bali tidak terlepas dari keberadaan dan peran subak, baik yang menyangkut masalah pertanian di lahan sawah maupun pertanian di lahan tegalan atau kering. Subak sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO tidak hanya dapat dilihat sebagai cagar budaya berupa bentangan sawah yang memiliki sistem irigasi unik, namun juga terdapat unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Subak sebagai lembaga tradisional tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pertanian, khususnya pertanian dengan sistem subak perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan masyarakat terutama masyarakat Bali. Sebab, subak merupakan salah satu ciri khas pertanian yang ada di Bali, terlebih subak telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Pada era modern ini keberlanjutan subak seolah diuji. Pengaruh globalisasi yang seolah menggerus kearifan lokal masyarakat menimbulkan pertanyaan bagaimana kearifan lokal dalam hal ini subak mampu sebagai penjamin tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan hayati. Akankah Subak hanya akan menjadi sebuah cerita, sebuah cerita budaya yang berhasil menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO.

Hasil kajian Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO menunjukkan kelestarian subak saat ini masih kurang terjaga. Perkembangan di sektor pariwisata di Provinsi Bali bagai pisau bermata dua. Selain berdampak berkembangnya perekonomian,

pariwisata ternyata menjadi tantangan bagi perkembangan pertanian di Provinsi Bali, tak terkecuali juga mengancam kelestarian organisasi Subak. Meskipun jumlah desa yang melakukan usaha pertanian meningkat, namun luas lahan yang dipakai untuk bertani justru mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu dampak peralihan lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Lahan non-pertanian digunakan untuk membangun hotel, resor, rumah makan, dan lain-lain. Selain penurunan jumlah lahan, jumlah petani juga mengalami penurunan. Jumlah lahan yang semakin sempit memaksa petani untuk beralih profesi. Selain itu, generasi muda di Bali kini enggan menekuni dunia pertanian karena gengsi sebab pendapatannya kalah dengan mereka yang bekerja di industri pariwisata.

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam penyusunan program perencanaan kelestarian subak, pengembangan zonasi yang mengatur penggunaan lahan di wilayah pertanian subak, meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani, dan sosialisasi mengenai pentingnya subak bagi kebudayaan Bali kepada masyarakat maupun wisatawan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Manfaat.....	7
1.5. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Kebudayaan.....	8
2.2 Kebudayaan di Provinsi Bali	12
2.3 Subak.....	15
2.3.1. Pengertian Subak.....	15
2.3.2 Struktur Organisasi Subak	17
2.3.3. Jaringan Irigasi Subak	19
2.3.4. Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia	21
2.3.5. Subak Sebagai Sistem Pertanian	22
2.3.6. Subak Sebagai Pariwisata	23
BAB III METODOLOGI.....	25
3.1 Pendekatan.....	25
3.2 Sumber Data.....	25
3.3 Metode Analisis	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Perkembangan Pertanian dan Jumlah Desa	29
4.2 Perkembangan Pariwisata	31
BAB V PENUTUP.....	40
5.1 Kesimpulan	40

5.2	Saran.....	41
	PUSTAKA ACUAN	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	16
Gambar 2.2.....	21
Gambar 4.1.....	29
Gambar 4.2.....	30
Gambar 4.3.....	32
Gambar 4.4.....	33
Gambar 4.5.....	33
Gambar 4.6.....	34
Gambar 4.7.....	35
Gambar 4.8.....	36
Gambar 4.9.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Secara umum, budaya adalah cara hidup yang mengatur agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan cara komunikasi atau bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut. Dalam setiap kebudayaan, terdapat unsur-unsur yang juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan lain. Koentjaraningrat menyebutnya sebagai unsur-unsur kebudayaan yang universal, meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud kebudayaan, yaitu: wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam suatu masyarakat, dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Menurut Koentjaraningrat, salah satu unsur kebudayaan adalah sistem mata pencaharian hidup. Indonesia sebagai negara agraris

yang memiliki iklim tropis, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian dengan cara bertani. Pertanian adalah manifestasi kebudayaan/peradaban manusia yang keberadaannya dewasa ini tidak lepas dari sejarah perkembangan kebudayaan/peradaban manusia sejak zaman purbakala, tak terkecuali di Indonesia. Contoh sistem pertanian yang ada di Indonesia antara lain, sistem pertanian subak di Bali dan pertanian sarang laba-laba di Manggarai, Nusa Tenggara Barat.

Pertanian bercocok tanam padi di Bali tidak terlepas dari keberadaan dan peran subak, baik yang menyangkut masalah pertanian di lahan sawah maupun pertanian di lahan tegalan atau kering. Subak sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO tidak hanya dapat dilihat sebagai cagar budaya berupa bentangan sawah yang memiliki sistem irigasi unik, namun juga terdapat unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Subak sebagai lembaga tradisional tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara alamiah lembaga dalam arti pranata mula-mula timbul sebagai keteraturan di dalam pola tingkah laku manusia, untuk kemudian menjadi kebiasaan. Sistem irigasi subak pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem teknologi dan juga dapat dipandang sebagai sistem kebudayaan. Karena adanya fenomena dan pengertian seperti ini, maka sering disebutkan bahwa sistem subak tersebut sebagai suatu sistem teknologi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat (Pusposutardjo, 2000, dalam Windia, 2012, hal 1), atau sistem seperti ini disebutkan pula sebagai suatu sistem teknologi yang telah berkembang menjadi fenomena budaya masyarakat (Puspowardojo, 1993, dalam Windia, 2012, hal 1). Sistem subak sebagai sistem teknologi, maupun sebagai

sistem kebudayaan, memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ekstrem, misalnya saja masalah kekurangan air yang selalu terjadi pada setiap musim kemarau. Masalah-masalah seperti ini pada umumnya dipecahkan dengan cara-cara tertentu berdasarkan konsep harmoni dan kebersamaan, yang sesungguhnya merupakan cerminan dan implementasi dari konsep *Tri Hita Karana* (THK), yang merupakan landasan dari sistem irigasi subak. Hal ini kiranya perlu dilaksanakan karena di masa depan kehidupan manusia akan semakin beragam, dan permasalahan yang muncul berkaitan dengan pemanfaatan air tampaknya tidak akan bisa dipecahkan semata-mata dengan aturan-aturan formal. Untuk itu sangat diperlukan suatu lembaga yang dapat memadukan aturan-aturan formal dan norma-norma religius secara operasional sebagaimana halnya telah berlaku dalam aktivitas sistem irigasi subak (Windia, 2012, hal 2).

Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tetap mendapatkan prioritas tinggi karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian ternyata lebih tangguh dibandingkan dengan sektor modern dalam menghadapi krisis moneter. Krisis moneter yang berkepanjangan, tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan sosial ekonomi dan politik tetapi juga berdampak pada ketersediaan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat (Salahudin, 1999, dalam Aryawan, 2013, hal 1). Kondisi tersebut menyadarkan pengambilan kebijakan terhadap pentingnya sektor pertanian sebagai pilar penyangga dalam ekonomi nasional. Pertimbangan yang dijadikan alasan akan pentingnya sektor pertanian terutama agribisnis sebagai andalan yang dapat memulihkan ekonomi nasional adalah sebagai berikut: (1)

Mempunyai karakteristik menciptakan kesempatan kerja relatif banyak. (2) Menghasilkan devisa. (3) Menjadi sumber pendapatan masyarakat terutama di pedesaan (Salahudin 1999). Dalam rangka optimalisasi sumberdaya domestik khususnya air, maka pembangunan irigasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya pertanian padi sawah sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi. Air adalah syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Air dapat berasal dari air hujan atau harus melalui pengairan yang diatur oleh manusia. Membawa air dari sungai ke sawah – sawah dikenal dengan istilah irigasi. Agar penggunaan air dapat dihemat dan biaya pengairan dapat dikurangi, pengaturan atau pengelolaan air mutlak diperlukan. Untuk pengaturan tersebut diperlukan suatu bentuk kelompok yang mengkoordinasikan sistem pengaturannya sehingga penggunaan air berdaya guna dan merata. (Cantika, 1985, dalam Aryawan, 2013, hal 2).

Selain sebagai bagian dari kebudayaan dan pertanian, subak juga berpotensi menjadi objek pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ke Bali. Provinsi Bali telah menetapkan arah pengembangan pariwisatanya melalui kepariwisataan budaya (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012). Salah satunya melalui pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis subak. Umumnya, subak di Bali yang berkembang menjadi DTW terletak di pedesaan, misalnya Subak Jatiluwih di Penebel Tabanan (Antara et al. 2017, dalam Diarta, 2018, hal 281) dan Subak Pulagan di Tampaksiring Gianyar (Sarita et al. 2013, dalam Diarta, 2018, hal 281). Kedua subak tersebut bahkan sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang ikut

menambah daya pikat terhadap subak. Namun, di samping di daerah pedesaan, subak juga ada yang terletak di perkotaan dan memiliki falsafah sama yaitu *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan dengan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya) (Diarta, 2018, hal 281). Objek wisata subak memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan persawahan yang luas dengan sistem terasering persawahannya yang membuat sawah dengan sistem irigasi subak berbeda dengan persawahan lainnya. Subak di Bali sendiri menjadi destinasi pariwisata yang mendatangkan wisatawan mancanegara dan nusantara. Subak terletak di destinasi pariwisata, dengan adanya pariwisata eksistensi subak semakin baik. Subak sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani, tanaman pangan, kebudayaan dan ekonomi pedesaan.

Pertanian, khususnya pertanian dengan sistem subak perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan masyarakat terutama masyarakat Bali. Sebab, subak merupakan salah satu ciri khas pertanian yang ada di Bali, terlebih subak telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selain itu, secara ekonomi pertanian mampu menyumbang sekitar 14% dari total PDRB Bali, tertinggi kedua setelah sektor penyediaan akomodasi & makan minum.

1.2. Permasalahan

Pada era modern ini kebertahanan subak seolah diuji. Kebertahanan subak menunjukkan kemampuan subak untuk bertahan dari intervensi pihak eksternal. Subak juga nyaris tidak memiliki daya lenting (resiliensi) (Windia, 2018, hal 135). Daya lenting merupakan kemampuan suatu lingkungan atau alam untuk kembali

berada pada titik keseimbangan seperti sediakala, sebelum dieksplorasi atau paling tidak, mendekatinya. Bahkan, menurut berita yang dipublikasikan oleh Media Indonesia tanggal 17 April 2019 disebutkan bahwa status Subak sebagai Warisan Budaya Dunia terancam dicabut, sebab ada wacana pembangunan landasan helikopter (*helipad*) di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, yang merupakan bagian dari wilayah Subak yang diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Pembangunan *helipad* tersebut akan merusak keaslian dari bentuk sawah.

Di sisi lain terjadi pengaruh globalisasi yang seolah menggerus kearifan lokal masyarakat maka timbul pertanyaan bagaimana kearifan lokal dalam hal ini subak mampu sebagai penjamin tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan hayati? Akankah Subak hanya akan menjadi sebuah cerita, sebuah cerita budaya yang berhasil menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO?

Dari uraian yang ada di latar belakang, permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu: bagaimana perkembangan kelestarian subak di masa selanjutnya?

1.3. Tujuan

Dari permasalahan dan penjelasan yang dikemukakan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai subak yang ada di Bali, dan dapat memberikan masukan kepada *stakeholder* untuk mengembangkan potensi subak sebagai warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO.

1.4. Manfaat

Secara umum, hasil Analisis mengenai subak diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi semua pihak untuk tetap mengembangkan dan mempertahankan budaya bangsa dalam proses globalisasi budaya khususnya tentang subak. Secara khusus bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, analisis mengenai subak dapat digunakan untuk melihat keterlaksanaan program, perencanaan program dan perumusan dan penentuan kebijakan. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil ini untuk pengembangan kebudayaan tahun-tahun berikutnya.

1.5. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan dalam 5 bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab 1 (Pendahuluan) berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Bab 2 (Kajian Pustaka) menjelaskan tentang subak dan ciri-cirinya. Bab 3 (Metodologi) menyajikan sumber data dan keterbatasannya dan metode analisis yang digunakan. Bab 4 (Pembahasan dan Analisis) menyajikan hasil analisis tentang subak dan Bab 5 (Penutup) berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata Latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai "Kultur" dalam bahasa Indonesia (Mahalli, 2016, hal 21). Budi atau akal menempatkan manusia sebagai makhluk yang tertinggi sebab manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kemampuan menciptakan hal-hal yang berguna bagi kelangsungan kehidupannya (makhluk berbudaya). Manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang akan membantu usahanya dalam memanfaatkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Manusia juga membuat perencanaan-perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Semua yang dihasilkan dan diciptakan oleh manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup itu disebut kebudayaan (Teng, 2017, hal 71).

Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Berikut pengertian kebudayaan menurut para ahli (Sari, 2018):

1. Josen dan Trenholm pengertian budaya diartikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, aturan dan juga kode.

2. Soelaiman Soemardi & Selo Soemardjan mengemukakan bahwa suatu kebudayaan merupakan hasil karya cipta & rasa masyarakat.
3. R. Seokmono menerangkan bahwa budaya adalah hasil kerja atau hasil usaha manusia yang berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia dimasa hidupnya.
4. Effat Al-Syarqawi mendefinisikan budaya berdasarkan sudut pandang agama islam, ia menjelaskan bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagai nilai menggariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan tujuan rohaniah.
5. Ki Hajar Dewantara budaya merupakan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap perubahan zaman. Perubahan yang terjadi memberi manfaat bagi masyarakat pada zaman sekarang untuk memanfaatkan perubahan budaya yang terjadi.
6. Kluckhohn dan Kelly budaya merupakan segala konsep hidup yang tercipta secara historis, baik yang implisit, irasional, yang ada di suatu waktu, sebagai acuan yang potensial untuk tingkah laku manusia.
7. Linton budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu.
8. Geert Hofstede budaya merupakan pemrograman bersama atas pikiran yang membedakan anggota-anggota satu kelompok orang dengan kelompok lainnya.

9. Edward T Hall budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya.
10. Francis Merill kebudayaan adalah semua perilaku dan produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis.
11. Djojodigono kebudayaan adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa.
12. Lehman, Himstreet dan Batty budaya sebagai kumpulan beberapa pengalaman hidup yang ada pada masyarakat mereka sendiri.
13. Pengertian budaya menurut Parsudi Suparian apabila seseorang memahami budaya maka mereka juga dapat memahami mengenai segala perkara yang berhubungan dengan pengalaman yang pernah terjadi selama masa hidupnya.
14. Drs. Mohammad Hatta kebudayaan ialah ciptaan hidup dari suatu bangsa.
15. Herskovits kebudayaan adalah sesuatu yang turun menurun dari satu generasi ke generasi lain yang kemudian disebut sebagai superorganik.
16. KKBI budaya berarti sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal budi. Secara tata bahasa arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya dimana cenderung menunjuk kepada cara berfikir manusia.
17. E.B. Taylor budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat.

18. Andreas Eppink mengemukakan pendapat bahwa suatu kebudayaan mengandung seluruh pengertian norma sosial, nilai sosial, dan juga ilmu pengetahuan beserta seluruh struktur sosial.
19. Robert H Lowie kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat yang mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik dan kebiasaan makan.
20. Budaya menurut Crydon kebudayaan adalah suatu sistem pola terpadu yang sebagian besar berada di bawah ambang batas kesadaran namun semua yang mengatur perilaku manusia seperti senar di manipulasi dari kontrol boneka gerakannya.
21. Dawson dalam bukunya yang berjudul Age of the gods kebudayaan merupakan cara hidup bersama.
22. Drs, Sidi Gazalba kebudayaan adalah cara berfikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang dan waktu.
23. Raymond Williams budaya adalah seluruh kehidupan, materi, intelektual, dan spiritual.

Berdasarkan uraian dari berbagai ahli di atas, secara umum kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan.

Dalam menjelaskan isi kebudayaan, Koentjaraningrat merujuk pada konsepsi Malinowski tentang unsur-unsur budaya

universal (*cultural universals*) sebagai berikut: (1) bahasa, (2) teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, (7) kesenian. Menurut Koentjaraningrat, setiap unsur kebudayaan itu dapat mempunyai tiga wujud, yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks gagasan, konsep, dan pemikiran manusia, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, (3) wujud kebudayaan sebagai benda (Yuliati, 2007, hal 1). Sebagai contoh, bahasa dapat berwujud sebagai sistem budaya (tata bahasa, norma-norma ujaran, dan aturan-aturan pemakaiannya), dapat berwujud sebagai suatu kompleks aktivitas (aktivitas manusia untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi), dan dapat berwujud sebagai benda (tulisan di atas lontar, tulisan di atas kertas, di atas mikrofis, di atas mikrofilm, dan sebagainya) (Yuliati, 2007, hal 1).

2.2 Kebudayaan di Provinsi Bali

Provinsi Bali terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Provinsi ini masuk dalam rangkaian kepulauan Nusa Tenggara. Dulu kepulauan ini pernah disebut dengan nama Sunda kecil. Suku bangsa Bali mendiami Pulau Bali yang sekarang menjadi sebuah Provinsi dengan delapan kabupaten dan satu kota yang merupakan ibukota provinsi, yaitu Kota Denpasar.

Dalam periode kolonialisasi di Indonesia, Belanda menemukan bahwa kebudayaan Bali sangatlah kaya dan memiliki daya pikat yang sangat memukai bangsa kulit putih dari Negeri Kincir Angin ini. Selain bertugas memonopoli perdagangan serta sistem produksi di Kepulauan Sunda Kecil dengan Bali sebagai salah satu pulau yang termasuk di dalamnya, Belanda sangat protektif terhadap keberadaan

dan keberlangsungan wujud budaya yang mereka kagumi. Belanda berusaha mencegah kebudayaan ini dari kepunahan. Dengan penuh kesadaran, staf kolonial Belanda bertugas di Bali saat itu membendung arus masuknya ajaran Nasrani dan Islam yang dipandang sebagai ancaman yang berpotensi mengikis kebudayaan Bali pada level yang membahayakan keutuhannya secara keseluruhan (Suartika, 2010, hal 315-316).

Di Bali kehidupan antara Agama hindu dan budaya setempat tampak bersinergi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Agama Hindu menempati posisi sebagai jiwa dan sumber nilai budaya Bali. Kedatangan Agama Hindu di Bali disambut dengan adaptasi budaya yang memunculkan kearifan lokal atau yang populer dikenal dengan *local wisdom*. Kearifan lokal memberi rona dan mewarnai kehidupan Agama Hindu dan budaya Bali. Agama Hindu memberikan pencerahan kepada masyarakat Bali dengan tetap melestarikan kepercayaan dan tradisi yang telah ada sebelumnya (Titib dalam Depbudpar dan Unud, 2006, hal 116).

Berbagai kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang sangat menentukan eksistensi Agama Hindu dan budaya Bali. Kebudayaan Bali memiliki identitas yang jelas, yaitu budaya ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti: nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni, dan nilai keseimbangan. Kelima nilai dasar tersebut ditengarai mampu bertahan dan berlanjut menghadapi berbagai tantangan sebelumnya (Titib dalam Depbudpar dan Unud, 2006, hal 117).

Kebudayaan Bali sesungguhnya merupakan ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali dengan lingkungannya. Dalam

kosmologi orang Bali, lingkungan dibedakan atas dua macam, yakni lingkungan *sekala* (nyata) dan lingkungan *niskala* (tidak nyata). Lingkungan *sekala* meliputi lingkungan sosial (masyarakat) dan lingkungan fisik (alam sekitarnya). Sedangkan lingkungan *niskala* merupakan lingkungan spiritual yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan supernatural atau adikodrati yang diyakini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia (Pujaastawa, 2014, hal 4).

Ekspresi dari interaksi antara orang Bali dengan lingkungan spiritual (*niskala*) melahirkan sistem religi lokal atau "agama Bali" yang di dalamnya mencakup emosi atau sentimen keagamaan, konsepsi tentang kekuatan-kekuatan dan mahluk-mahluk gaib, upacara ritual keagamaan, fasilitas keagamaan, kelompok atau komunitas keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya keberadaan religi lokal tersebut bercampur dengan unsur-unsur agama Hindu yang disebabkan oleh adanya proses perjumpaan kebudayaan pada masa lampau (Pujaastawa, 2014, hal 4).

Ekspresi dari interaksi antara orang Bali dengan lingkungan sosial antara lain melahirkan Basa Bali (Bahasa Bali), norma-norma, peraturan-peraturan, hukum (*sima*, *dresta*, *awig-awig*), pranata-pranata sosial seperti pranata kekerabatan (*nyama*, *braya*, *dadia*, *soroh*), dan pranata kemasyarakatan (*ekeha*, *banjar*, *desa*, *gumi*) dan sebagainya (Pujaastawa, 2014, hal 5).

Ekspresi dari interaksi orang Bali dengan lingkungan fisik antara lain melahirkan sistem pengetahuan tentang alam seperti sistem subak, dan lain sebagainya. Di samping itu, orang Bali juga mengenal berbagai jenis peralatan dan teknologi yang digunakannya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik (Pujaastawa, 2014, hal 5).

2.3 Subak

2.3.1. Pengertian Subak

Subak merupakan salah satu kearifan lokal yang masih eksis di beberapa wilayah di Bali adalah organisasi pembagian air di areal sawah secara tradisional. Organisasi subak memiliki empat elemen yaitu, lahan pertanian (sawah), sumber air, anggota subak, dan pura subak. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Wiguna dan Surata (2008) subak sampai saat ini masih dipercaya dan diinginkan oleh hampir 70% masyarakat Bali untuk tetap eksis. Di samping itu pemerhati subak seperti Pitana (1993), Windia (2002), Sutawan (2003), meyakini bahwa melestarikan subak merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga pelestarian pertanian dan lingkungan dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dan hayati khususnya di daerah Bali (Martiningsih, 2012, hal 303).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak Pasal 1, Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Tujuan Subak menurut Pasal 3 yaitu: memelihara dan melestarikan organisasi Subak, mensejahterakan kehidupan petani, mengatur perairan dan tata tanaman, melindungi mengayomi petani, dan memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Berdasarkan pengertian subak yang terdapat di dalam Perda Bali di atas, maka subak bersifat sosio agraris religius yang dimanifestasikan dalam kegiatan pengairan, pola tanam, dan upacara. Dengan demikian, subak mempunyai tiga komponen,

yaitu: 1) komponen fisik, 2) komponen sistem sosial, dan 3) komponen nilai budaya. Komponen fisik berupa prasarana dan sarana subak, komponen sistem sosial berupa pengelolaan atas komponen fisik, dan komponen nilai budaya berupa nilai-nilai, adat, dan aturan-aturan (Sirtha, 2016, hal 3).



Gambar 2.1
Subak Pulagan di Kab. Gianyar, Salah Satu Subak yang Telah Ditetapkan oleh UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia

Setiap subak harus memiliki *awig-awig*. *Awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan yang mengatur tentang Subak. *Awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan disepakati dan disahkan bersama oleh anggota Subak atau yang disebut *krama subak* serta dicatatkan di Kantor Bupati/Walikota. Selain peraturan, *awig-awig* juga berisi sanksi-sanksi bagi pelanggar. Sanksi yang diatur dalam *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan praturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Subak sebagai lembaga tradisional tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara alamiah lembaga dalam arti *pranata* (institusi) mula-mula timbul sebagai *keajegan-keajegan* (ketetapan) di dalam pola tingkah laku manusia, untuk kemudian menjadi kebiasaan. Jika kebiasaan itu kemudian melekat harapan dan sanksi maka lahirlah *pranata*. Ketika *pranata* itu sudah teratur dan mapan atau sudah melembaga, maka dibentuklah organisasinya (Soedjito, 1986). Sesuai dengan pandangan tersebut, subak merupakan suatu pranata sosial yang tumbuh dari kebiasaan. Setelah mapan, subak itu memerlukan suatu wadah atau organisasi yang berfungsi sebagai pelaksananya (Sirtha, 2016, hal 2).

2.3.2 Struktur Organisasi Subak

Menurut laman *bulelengkab.go.id* (Diakses 10 Juni 2019), anggota subak atau juga biasa disebut dengan *krama subak* adalah para petani yang memiliki garapan sawah dan mendapatkan bagian air pada sawahnya. Didalam anggota subak juga terdapat beberapa kelompok yang disebut dengan *Sekaa*. *Krama subak* digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. *Krama aktif* adalah anggota yang aktif seperti *krama pekaseh*, *sekaa yeh* atau *sekaa subak*.
- b. *Krama pasif* yaitu anggota yang mengganti kewajibannya dengan uang atau *natura* karena beberapa penyebab yang biasa disebut dengan *Pengampel* atau *Pengohot*.

- c. *Krama luput* yaitu anggota (krama) yang tidak aktif didalam segala macam kegiatan subak karena tugasnya seperti kepala desa atau *Bendesa Adat*.

Pengurus (*prajuru*) subak terdiri dari:

- a. *Pekaseh/Kelian* adalah bertugas sebagai kepala subak.
- b. *Pangliman/Petajuh* bertugas menjadi wakil kepala subak.
- c. *Peyarikan/Juru tulis* adalah sebagai sekretaris.
- d. *Petengen/Juru raksa* adalah memiliki tugas sebagai bendahara.
- e. *Saya/juru arah/juru uduh/juru tibak/kasinoman* mempunyai tugas dalam urusan pemberitahuan atau pengumuman.
- f. *Pemangku* adalah bertugas khusus dalam urusan ritual/keagamaan.

Kelompok (*sekaa*) di dalam subak dibagi menjadi:

- a. *Sekaa Numbeg*, yaitu sebuah kelompok yang mengatur hal pengolahan tanah.
- b. *Sekaa Jelinjingan*, kelompok yang bertugas untuk mengatur pengolahan air.
- c. *Sekaa Sambang*, yaitu kelompok yg memiliki tugas dalam hal pengawasan air dari pencurian, penangkap atau penghalau binatang perusak tanaman seperti burung maupun tikus.
- d. *Sekaa Memulih/Nandur*, yaitu kelompok yang bertugas dalam hal penanaman bibit padi.
- e. *Sekaa Mejukut* yaitu kelompok yang bertugas menyangi padi.

- f. *Sekaa Manyi* adalah kelompok yang bertugas menuai/memotong/mengetam padi.
- g. *Sekaa Bleseng* yaitu kelompok yang memiliki tugas mengangkut ikatan padi yang telah diketam dari sawah ke lumbung.

2.3.3. Jaringan Irigasi Subak

Menurut laman bulelengkab.go.id, subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional, keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi/konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berasal dari kata "Tri" yang artinya tiga, "Hita" yang berarti kebahagiaan/kesejahteraan dan "Karana" yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Tri Hita Karana berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan".

Penerapannya didalam sistem subak yaitu:

- a. *Parahyangan* yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.
- b. *Pawongan* yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya.
- c. *Palemahan* yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya (bulelengkab.go.id).

Para ahli juga menyebutkan bahwa Subak juga sebagai sistem teknologi yang sudah menjadi budaya di Bali. Subak sebagai metode teknologi dari budaya asli petani Bali. Fasilitas yang utama dari irigasi subak (*palemahan*) untuk setiap petani anggota subak adalah berupa *pengalapan* (bendungan air),

jelinjing (parit), dan sebuah *cakangan* (satu tempat/alat untuk memasukkan air ke bidang sawah garapan).

Jaringan sistem pengairan dalam subak jika diurut dari sumber air terdiri dari:

- a. *Empelan/empangan* sebagai sumber aliran air/bendungan.
- b. *Bungas/Buka* adalah sebagai pemasukan (*in take*).
- c. *Aungan* adalah saluran air yang tertutup atau terowongan.
- d. *Telabah aya (gede)*, adalah saluran utama.
- e. *Tembuku aya (gede)*, adalah bangunan untuk pembagian air utama.
- f. *Telabah tempek (munduk/dahanan/kanca)*, adalah sebagai saluran air cabang.
- g. *Telabah cerik*, sebagai saluran air ranting.
- h. *Telabah panyacah (tali kunda)*, di beberapa tempat dikenal dengan istilah *Penasan* (untuk 10 bagian), *Panca* (untuk 5 orang), dan *Pamijian* (untuk sendiri/1 orang).

Melalui sistem Subak inilah, para petani mendapatkan bagian air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh musyawarah dari warga/*krama subak* dan tetap dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana*. Maka dari itu, kegiatan dalam organisasi/perkumpulan Subak tidak hanya meliputi masalah pertanian atau bercocok tanam saja, tetapi juga meliputi masalah ritual dan peribadatan untuk memohon rejeki dan kesuburan.

Setiap Subak biasanya memiliki pura yang disebut *Pura Ulun Carik* atau *Pura Bedugul*, yang khusus dibangun oleh para petani untuk memuja *Dewi Sri*. Sistem pengairan ini diatur oleh seorang tokoh adat dan juga merupakan petani yang disebut dengan

Kelian (Klian) yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengelola subak. Untuk menjadi *Kelian subak* ini adalah sifatnya sosial, tidak mendapatkan gaji ataupun imbalan. Pembagian atau penyaluran air disesuaikan dengan keanggotaan petani di subak (anggota yang aktif dan pasif) keduanya mendapat pembagian air yang berbeda. Inilah dasar keadilan dimana distribusi air disesuaikan dengan kontribusi.



Gambar 2.2
Pura di Subak Pulagan

2.3.4. Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia

Pada tanggal 29 Juni 2012 dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di Kota Saint Peterburg, Federasi Rusia, pengusulan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia telah disetujui dan ditetapkan (kebudayaan.kemdikbud.go.id). Sesuai dengan pengajuannya, Subak di Bali yang memiliki luas kurang lebih

20.000 ha yang terdiri atas beberapa subak yang berada di 5 kabupaten, yaitu kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, dan Tabanan (bulelengkab.go.id). Menurut laman bulelengkab.go.id, situs-situs di Bali yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia adalah:

- a. Pura Ulun Danu Batur di ujung danau Batur yang merupakan pura air utama (*water temple*) sebagai sumber dari setiap mata air dan sungai.
- b. Lanskap Subak dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan, yang diketahui sebagai sistem irigasi yang tertua di Bali.
- c. Lanskap Subak dari Catur Angga Batukaru, objek wisata persawahan berundak-undak (terasering) Jatiluwih merupakan salah satu dari bagiannya.
- d. Pura Taman ayun, merupakan pura air yang paling besar dengan arsitekturnya paling terkenal, mencontohkan ekspansi penuh dari sistem subak di bawah pemerintahan kerajaan Bali pada abad ke-19.

2.3.5. Subak Sebagai Sistem Pertanian

Pada dasarnya subak merupakan sistem pertanian yang didalamnya terkandung kearifan alam dan sosial. Kamandalu, Aurum, dan Aryawati (2012) dalam Model Pemberdayaan Subak Melalui Penerapan Prima Tani Dalam Rangka Mewujudkan Subak Sebagai Lembaga Usaha Ekonomi dan Agribisnis menyebutkan fungsi pokok subak adalah mengatur pembagian air dengan seadil-adilnya bagi anggotanya. Lembaga subak ini merupakan kelompok yang sangat ditaati oleh anggotanya, karena setiap anggota merasakan ketergantungannya terhadap air. Disamping

itu, unsur religius atau keagamaan juga merupakan faktor pengikat yang sangat kuat. Dengan dua fungsi pokok di atas, subak yang ada di Bali aktivitasnya cenderung mengarah kepada masalah teknis irigasi dan sosial/ritual (keagamaan) saja. Namun, di era saat ini subak juga perlu memperhatikan sisi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan kesejahteraan anggota subak.

Subak merupakan budaya masyarakat Bali khususnya dan aset nasional pada umumnya, memerlukan penanganan khusus di era globalisasi saat ini. Organisasi subak begitu kuat dan sangat dipercaya oleh para anggotanya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa subak menjadi penunjang utama dari eksistensi sektor pertanian. Bahkan sistem subak dinilai memiliki peranan yang sangat nyata dalam proses pembangunan nasional (Kamandalu *et al*, 2012, hal 181). Namun kenyataannya, sumber air sering menjadi masalah bagi pertanian di Bali. Perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Bali yang menjadikan air sebagai sumber daya yang dibutuhkan oleh banyak sektor, membuat subak tidak berdaya menghadapi kenyataan ini. Jika sektor pariwisata tidak dapat disinergikan dengan sektor pertanian maka sistem subak akan terancam eksistensinya sebagai penunjang utama sektor pertanian.

2.3.6. Subak Sebagai Pariwisata

Untuk beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata telah menjadi generator penggerak dalam pembangunan ekonomi, dan menjadi lokomotif dalam perubahan sosial-budaya di beberapa Daerah Tujuan Wisata, termasuk Bali (Pitana dalam Depbudpar dan Unud,

2006, hal 259). Internasionalisasi lewat pariwisata, khususnya pariwisata budaya dengan industri budayanya, membawa masyarakat lokal terjepit diantara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara tradisi dan adat budayanya, yang merupakan komoditas yang dapat dijual dalam pariwisata. Di sisi lain, internasionalisasi melalui jaringan pariwisata budaya berarti secara sengaja membenturkan kebudayaan lokal tersebut dengan dunia modern. Ini memberikan peluang besar bahwa budaya lokal akan hanyut dalam derasnya gelombang budaya global (Pitana dalam Depbudpar dan Unud, 2006, hal 259).

Subak di Bali pada umumnya merupakan kelembagaan sosio-agraris-religius di sektor pertanian, tetapi sangat menarik sebagai daya tarik wisata dari beragam atraksi yang bisa dikembangkan seperti lanskap persawahan, ritual agama, produk pertanian, dan kehidupan sosial petaninya. Namun, pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata dalam wilayah warisan budaya merupakan salah satu dampak negatif pariwisata terhadap Bali. Lapangan parkir, fasilitas kamar kecil, restoran, kios-kios cinderamata, hotel dan kantor-kantor informasi seringkali dibangun dekat atau bahkan di dalam situs. Sebagai hasilnya, semakin sulitnya akses ke situs tersebut, pengaturan tata ruang berdasarkan doktrin kosmologi terganggu, dan keindahan dari lanskap budaya tersebut tercemar dan menjadi kurang dapat dinikmati. Isu-isu semacam ini perlu ditangani, dengan konsultasi bersama masyarakat setempat serta pemerintah berwenang terkait, untuk mencegah dan memperbaiki dampak negatif pariwisata (Dit. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, 2013, hal 49).

BAB III METODOLOGI

3.1 Pendekatan

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini didasarkan atas dokumen-dokumen dan publikasi lainnya berkaitan subak. Analisis ini berusaha menggambarkan kondisi subak saat ini secara naratif.

3.2 Sumber Data

Analisis ini merupakan analisis deskriptif. Analisis ini didasarkan atas dokumen-dokumen dan publikasi lainnya berkaitan dengan subak yang ada di buku maupun di internet. Data yang digunakan diambil dari Statistik Indonesia 2018, Statistik Potensi Desa 2008, 2014, dan 2018, Statistik Bali Dalam Angka 2008, 2014, dan 2018, dan Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2017.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Analisis sederhana dengan menggunakan persentase dan diperjelas dengan tabel, grafik atau diagram dalam memudahkan penafsiran. Melalui visualisasi diagram atau tabel yang diperoleh, dapat memberikan gambaran mengenai suatu fenomena dari objek kajian untuk memahami permasalahan yang diteliti (Rahani, 2012, hal 52). Sedangkan Sukmadinata (2006, hal 72) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang yang berlaku yaitu UU no. 43 no. 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen perbatasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas, Indonesia terdiri atas beberapa provinsi yang memiliki wewenang sebagai pemerintah daerah tingkat pertama. Provinsi sendiri terbagi menjadi beberapa kabupaten/kota sebagai pemerintah daerah tingkat kedua. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi beberapa kecamatan. Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Hasil pendataan BPS melalui pendataan Potensi Desa tahun 2018 mencatat bahwa terdapat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan

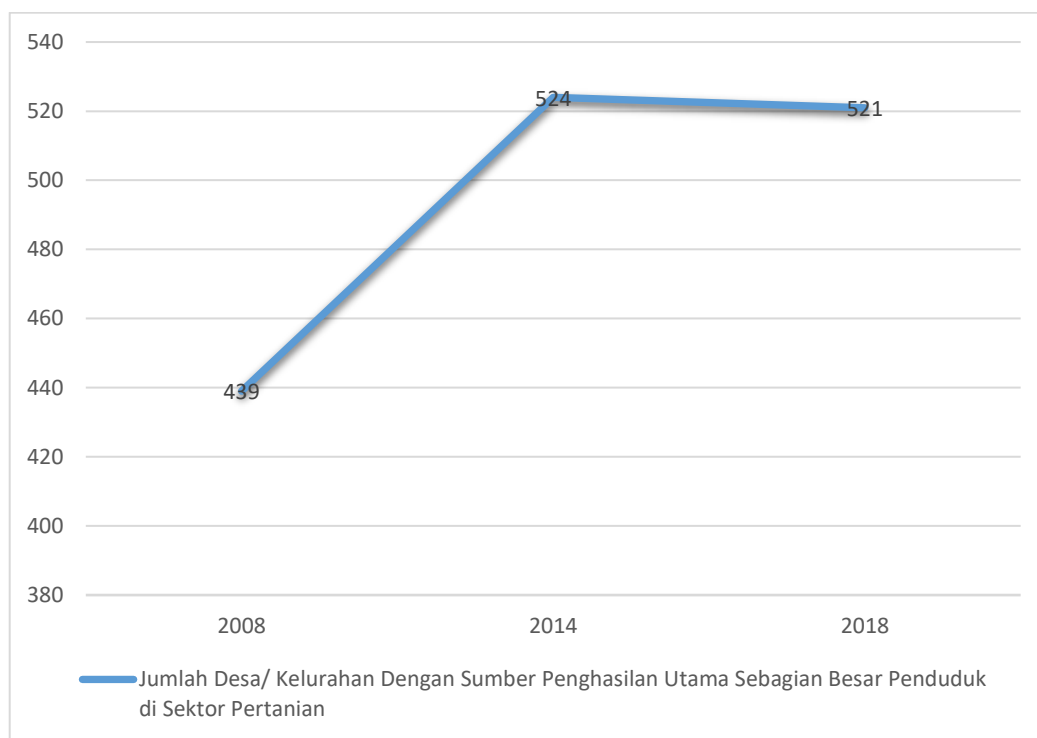
setingkat desa, yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 Unit Pemukiman Transmigrasi/Satuan Permukiman Transmigrasi.

Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota yang ada di dalam suatu provinsi di Indonesia. Desa terjadi karena sejumlah manusia (beserta keluarganya) memilih tempat bermukim di wilayah tertentu. Para pendiri desa, yaitu mereka yang pertama kali membuka hutan belukar dan menjadikannya sebagai dusun-dusun kecil dengan sendirinya mendapat kehormatan sebagai pemimpin dusun yang selanjutnya akan menjadi kepala desa. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang batu dan lain-lain.

Melihat kondisi geografis serta historis rakyat Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pekerjaan sebagai petani. Pada Statistik Indonesia 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, 29,6% atau 35.923.886 penduduk Indonesia bekerja dengan lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Selain itu, dalam Statistik Potensi Desa 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, 38,66% desa di seluruh Indonesia, masyarakatnya memiliki penghasilan utama di bidang pertanian padi. Indonesia memiliki beberapa sistem pengairan/irigasi tradisional untuk menunjang aktivitas pertanian, seperti sistem irigasi jaring laba-laba (lodok) yang ada di Nusa Tenggara Timur dan sistem irigasi terasering (subak) yang ada di Bali.

4.1 Perkembangan Pertanian dan Jumlah Desa

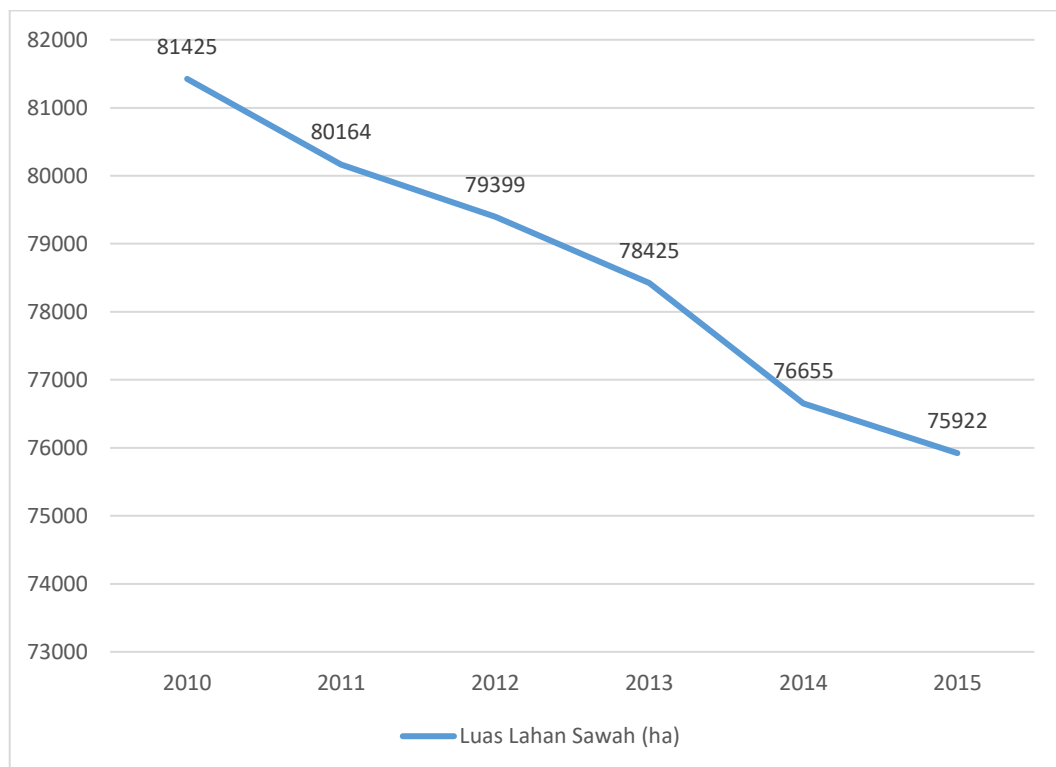
Secara khusus di Provinsi Bali, jumlah desa mengalami kenaikan pada periode 2008—2014, dan mengalami penurunan pada periode 2014—2018. Berikut perbandingan banyaknya desa/kelurahan menurut sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di sektor pertanian pada tahun 2008, 2014, dan 2018 menurut Statistik Potensi Desa tahun 2008, 2014, 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.



Gambar 4.1
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk
di Sektor Pertanian di Provinsi Bali

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa 2008, 2014, dan 2018

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2008 terdapat 439 desa di Provinsi Bali yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat pesat di tahun 2014, sebesar 19,4% menjadi 524 desa. Namun, pada tahun 2018 jumlah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian menurun menjadi 521 desa.



Gambar 4.2
Luas Lahan Sawah (Ha) di Provinsi Bali

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2018

Meningkatnya jumlah desa/ kelurahan yang memiliki sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di sektor pertanian, tidak berbanding lurus dengan jumlah luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Setiap tahunnya, jumlah luas lahan yang digunakan untuk pertanian di Provinsi Bali selalu mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik

dalam Statistik Indonesia 2018. Sejak tahun 2010 hingga 2015 luas lahan persawahan berkurang sebesar 5.503 Ha atau 6,76% dari 81.425 Ha menjadi 75.922 Ha. Penurunan jumlah lahan persawahan salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Secara umum, penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Menurut buku yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar tahun 2016 tentang Subak Bali, disebutkan bahwa seluruh subak di Bali mengalami berbagai ancaman dan permasalahan, diantaranya penjualan tanah dan alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan pendukung pariwisata. Hal ini menjadi ironis, sebab kecantikan bentang perasawahan Bali yang meningkatkan kunjungan wisatawan, juga menyebabkan lahan persawahan semakin tergerus. Kebanyakan pinggir jalan di Bali ditutupi oleh *art shop* yang menjual barang kerajinan. Ini menciptakan dilema, toko-toko tersebut menghalangi pandangan ke persawahan dan di pihak lain masyarakat mencari keuntungan dengan menjual kerajinan.

4.2 Perkembangan Pariwisata

Pertumbuhan pariwisata bagaikan pisau bermata dua bagi perkembangan Subak di Bali. Di satu sisi, semakin bertumbuhnya pariwisata akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Sektor penyediaan akomodasi & makan minum sendiri menyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Bali selama tiga tahun berturut-turut selama 2015-2017 sebesar 23,01%, 22,76%, dan 23,33% (Sumber: Bali Dalam Angka 2018). Selain itu, sektor pariwisata juga bisa memperkenalkan

lahan pertanian subak di mata dunia sebagai destinasi wisata baru di Provinsi Bali, terlebih subak telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, ditambah jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali setiap tahunnya selalu bertambah. Dalam periode sembilan tahun (2009-2017) jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali meningkat dua kali lipat lebih.

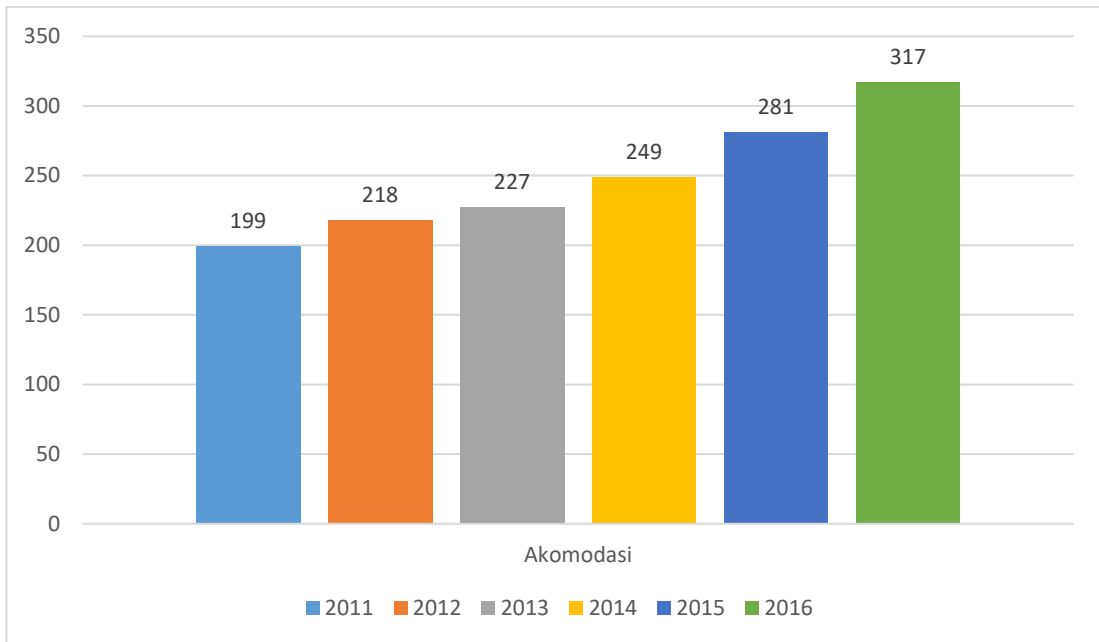


Gambar 4.3
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Bali 2009-2017

Sumber: Bali dalam Angka 2014, Bali dalam Angka 2018

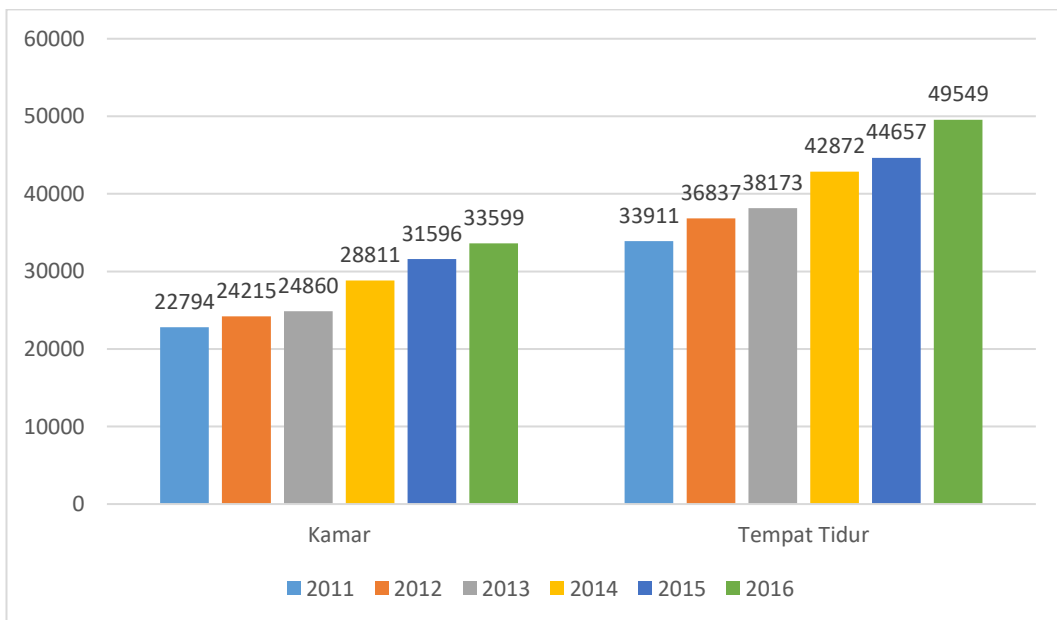
Di sisi lain, meningkatnya pertumbuhan pariwisata, menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan subak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian terus bertambah, salah satunya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri perhotelan dan rumah makan. Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya, otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap kamar hotel. Artinya, kemungkinan akan ada hotel-hotel baru yang dibangun di seputaran

Bali untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan, yang mengubah lahan pertanian menjadi non pertanian.



Gambar 4.4
Jumlah Akomodasi yang Tersedia pada Hotel Bintang
Menurut Provinsi, 2011-2016 di Provinsi Bali

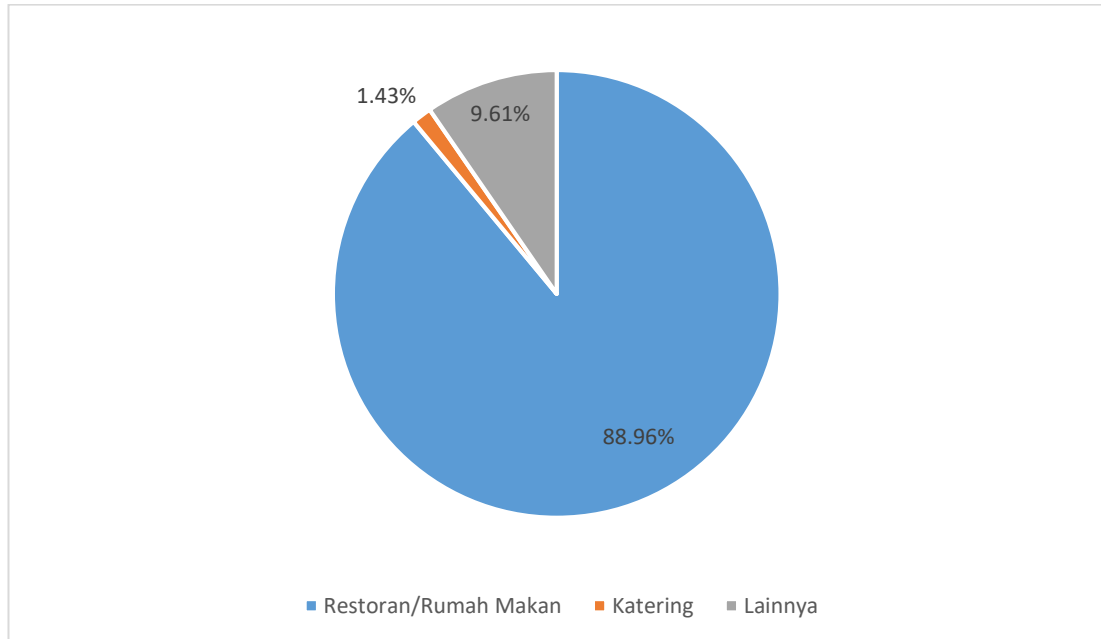
Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2018



Gambar 4.5
Jumlah Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang
Menurut Provinsi, 2011-2016 di Provinsi Bali

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2018

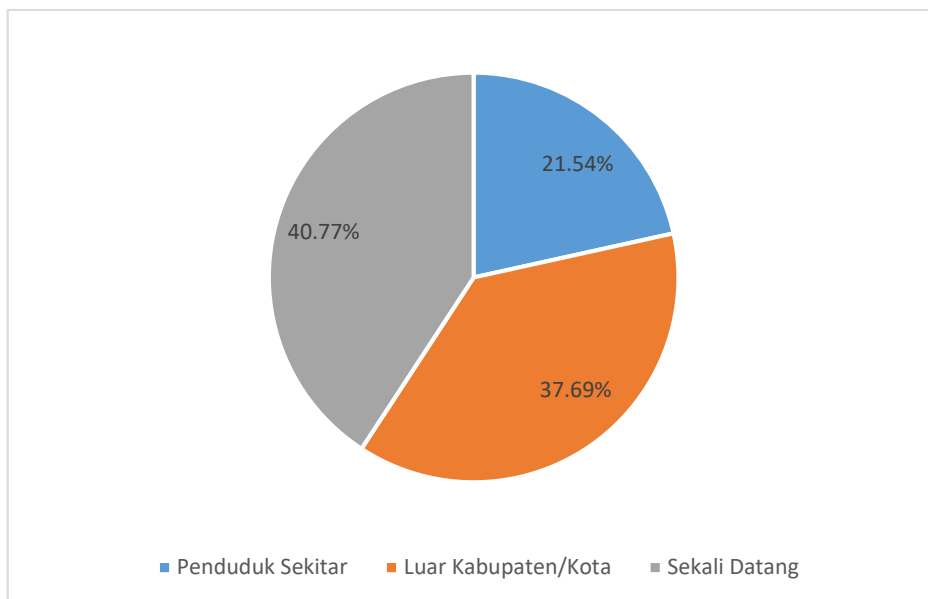
Selain perhotelan, sektor penting yang ada dunia pariwisata adalah industri makanan dan minuman. Di Bali, sektor industri makanan dan minuman didominasi oleh restoran atau rumah makan dengan persentase 88,96% dari total usaha penyediaan makanan dan minuman di seluruh Provinsi Bali.



Gambar 4.6
Jumlah Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman
Menurut Provinsi dan Jenis Usaha, Tahun 2017 di Provinsi Bali

Sumber: BPS, Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2017

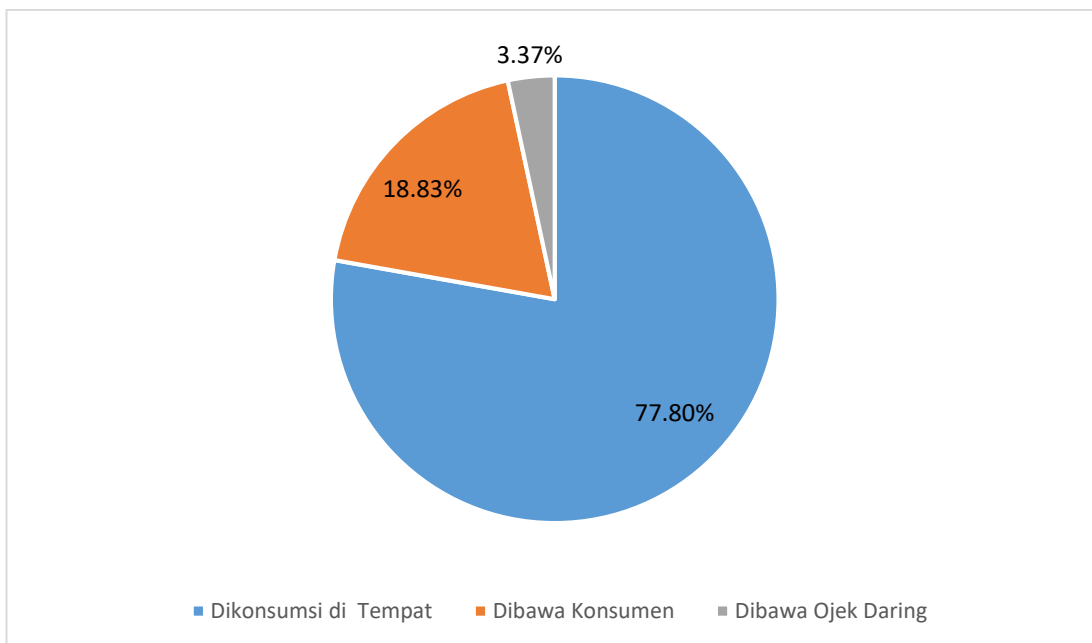
Namun, hanya 21,54% penduduk lokal yang menjadi pelanggan di rumah makan. Artinya, hampir 80% pengunjung rumah makan yang ada di Bali berasal dari luar kabupaten/ kota, yang kemungkinan berkunjung ke Bali dalam rangka kegiatan wisata.



Gambar 4.7
 Persentase Banyaknya Pelanggan pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman
 Menurut Tempat Tinggal Pelanggan, Tahun 2017 di Provinsi Bali

Sumber: BPS, Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2017

Selain itu, pelanggan rumah makan di Bali cenderung mengonsumsi makanan atau minuman yang dibeli di tempat. Artinya, rumah makan di Bali harus menyediakan tempat yang cukup untuk menampung jumlah pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang mendatangi rumah makan, maka pengelola restoran harus menyediakan tempat yang cukup untuk menampung pelanggan, atau dapat juga dengan membuka cabang rumah makan baru di tempat lain. Tingginya pengunjung rumah makan, dapat mendorong pemilik usaha untuk menyediakan tempat yang lebih luas, sehingga ada kemungkinan lahan-lahan yang dulunya digunakan untuk pertanian berubah fungsi menjadi rumah makan/restoran.



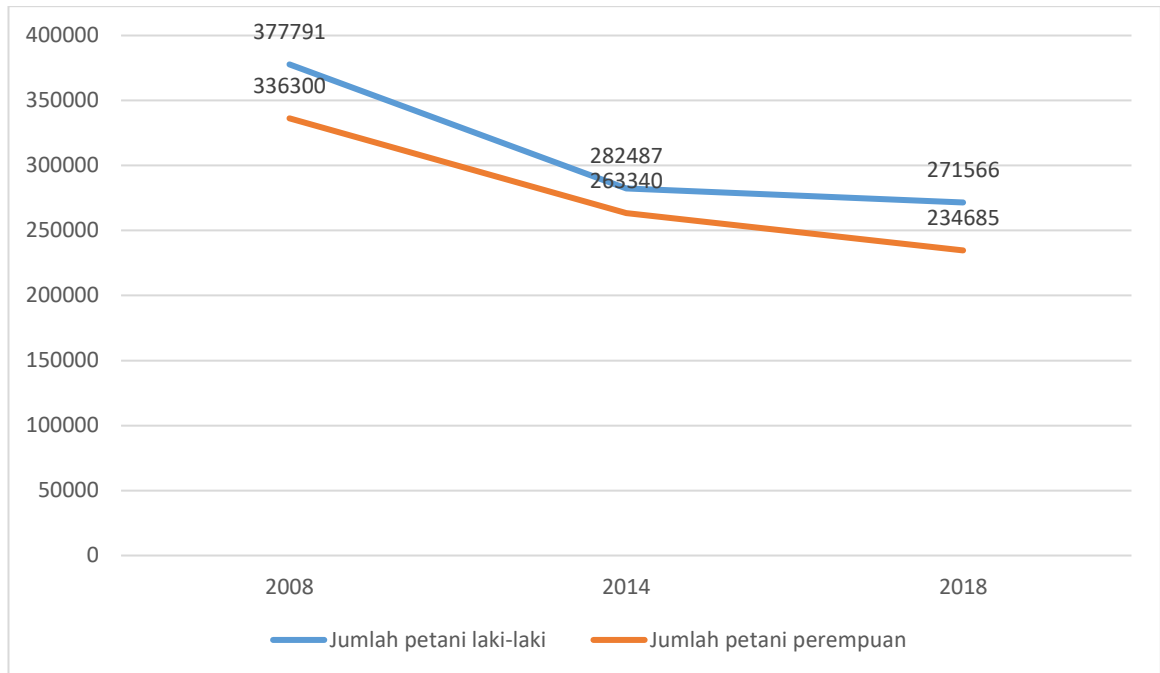
Gambar 4.8
 Persentase Banyaknya Porsi yang Dipesan pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Menurut Provinsi dan Tempat Mengonsumsi, Tahun 2017 di Provinsi Bali

Sumber: BPS, Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2017

Perkembangan kelestarian sistem pertanian subak tidak hanya dari faktor lahan pertanian, namun juga keberadaan para petani. Petani dan lahan pertanian merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tanpa lahan, maka petani tidak mempunyai tempat untuk melakukan aktivitas pertanian, sedangkan tanpa petani maka lahan pertanian tidak mempunyai pekerja yang mengolah lahan tersebut.

Meskipun terjadi lonjakan jumlah desa yang melakukan pertanian seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.1, jumlah petani dari tahun ke tahun di Provinsi Bali justru mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dari jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Bali berdasarkan

tahun 2008, 2014, dan 2018 yang diambil dari Statistik Bali dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Bali.



Gambar 4.9

Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Bali Menurut Provinsi dan Jenis Usaha, Tahun 2017 di Provinsi Bali

Sumber: BPS Bali, Statistik Bali Dalam Angka 2008, 2014, dan 2018

Penurunan jumlah petani di Indonesia, secara umum antara lain disebabkan pendapatan petani yang lebih kecil, serta kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian. Pendapatan petani yang kecil salah satunya disebabkan petani tidak memiliki lahan sendiri. Berdasarkan berita yang diterbitkan *jawapos.com* tanggal 12 Oktober 2018 disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sensus pertanian 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,50 hektare. Sementara, menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada

2013 lalu masih terdapat 7,75 juta hektar lahan sawah. Petani Penggarap Kertawinangun, Indramayu, Abu Tolib mengungkapkan para buruh tani yang dipekerjakan di lahan orang hanya mendapat bayaran sebesar Rp 60-70 ribu per hari. Sementara itu, Petani Tulungagung, Pur mengungkapkan, petani di kawasannya banyak yang menyewa lahan milik orang. Padahal, sebelumnya banyak juga yang memiliki lahan sendiri. Kebutuhan ekonomi mau tidak mau menjadi pertimbangan utama dalam menjual lahannya. Dia menegaskan, untuk para petani yang dipekerjakan di lahannya diberikan bayaran sekitar Rp 70-80 ribu per hari. Selain itu, ada juga yang sebagian dari petaninya mendapat bayaran dengan berbagi hasil panen kepada si pemilik lahan. Upah yang relatif kecil ini memaksa para petani untuk beralih profesi mencari pekerjaan lain.

Penurunan jumlah petani tidak hanya disebabkan oleh pendapatan petani yang sedikit dan memaksa para petani beralih profesi. Penurunan jumlah petani juga disebabkan karena generasi muda tidak tertarik dengan pertanian, tidak terkecuali di Bali. Laman berita *surabaya.bisnis.com* pada tanggal 30 Juli 2018 menyebutkan bahwa generasi muda di Bali kini enggan menekuni dunia pertanian karena gengsi. Anggota DPR RI Nyoman Dhamantra mengatakan selain itu lantaran pendapatannya kalah dengan mereka yang bekerja di industri pariwisata. Selain menyebutkan tentang minat generasi muda Bali terhadap pertanian, Dhamantra mengingatkan, di Bali, pertanian bukan semata sebuah usaha tani, tetapi merupakan salah satu budaya yang selama ini menjadi andalan pariwisata Bali. Jika pertanian terus menyusut, tanah dan budaya akan ikut tergerus.

Pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan subak. Upaya telah dilakukan salah satunya dengan mengadakan lomba subak baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Kegiatan lomba ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk melestarikan subak yang ada di wilayahnya. Di samping melaksanakan lomba Subak, menurut observasi di lapangan pemerintah daerah juga melakukan upaya-upaya lain seperti: secara berkala adanya pemangkasan/pemupukan, adanya subsidi dari pemerintah kisaran 50% dari Pemda, adanya permohonan dana, adanya subsidi 100 juta dana hibah untuk petani untuk simpan pinjam, pemerintah langsung ke lapangan untuk mengatasi masalah, dan adanya penyemprotan (MH Budiarto, 2016, hal 4). Namun, upaya dari pemerintah saja tidak cukup. Pelestarian subak di Bali harus menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pelestarian subak menjadi sangat penting, sebab subak merupakan warisan budaya leluhur yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Selain itu, pertanian subak merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Bali. Apabila tidak dilestarikan secara sungguh-sungguh, maka status warisan budaya dunia bisa saja dicabut oleh UNESCO, dan dalam jangka waktu yang panjang, subak dapat saja punah dan hanya menjadi bagian dari cerita rakyat.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelestarian subak pada saat ini masih kurang terjaga karena terjadinya perkembangan pariwisata, alih fungsi lahan, penyempitan lahan pertanian, alih profesi petani, dan keengganan generasi muda menjadi petani. Penetapan lanskap subak menjadi warisan budaya dunia memberikan dampak positif, yaitu sistem irigasi subak menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Bali. Pembangunan di sektor pariwisata di Provinsi Bali dari tahun ke tahunnya selalu meningkat. Namun, perkembangan di sektor pariwisata bagai pisau bermata dua. Selain berdampak berkembangnya perekonomian, pariwisata ternyata menjadi tantangan bagi perkembangan pertanian di Provinsi Bali, tak terkecuali juga mengancam kelestarian organisasi Subak. Hal ini berdampak pada peralihan lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Lahan non-pertanian digunakan untuk membangun hotel, resor, rumah makan, dan lain-lain.

Jumlah desa di Provinsi Bali yang melakukan usaha pertanian meningkat tajam sebesar 19,4% pasca Subak ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Namun luas lahan sawah tiap tahunnya mengalami penyempitan. Berdasarkan data dari BPS, dalam kurun waktu enam tahun selama 2010 hingga 2015 luas lahan sawah di Bali mengalami penyempitan sebesar 5503 Ha.

Seiring terjadinya peralihan lahan pertanian, terjadi pula jumlah petani juga mengalami penurunan. Petani yang sebelumnya memiliki sawah untuk digarap harus beralih profesi karena lahannya telah dijual untuk pembangunan hotel, resor, rumah makan, dan lainnya. Jumlah lahan yang semakin sempit memaksa petani untuk beralih profesi.

Selain faktor di atas, generasi muda di Bali kini enggan menekuni dunia pertanian karena gengsi. Pendapatan di sektor pertanian kalah dengan mereka yang bekerja di industri pariwisata. Perbedaan pendapatan antar sektor inilah menyebabkan timbulnya gengsi.

5.2 Saran

Pertanian di Provinsi Bali bukan semata usaha tani, tetapi merupakan salah satu budaya yang selama ini menjadi andalan pariwisata Bali. Kondisi saat ini lahan pertanian yang menggunakan sistem subak semakin menyusut, dan bukan tidak mungkin apabila tidak ada intervensi dari semua *stakeholder* maka kelestarian subak akan terus tergerus. Oleh karena itu, sejumlah saran diajukan sebagai berikut.

- a. Pemerintah pusat dan daerah secara bersama mengembangkan perencanaan pariwisata berbasis subak sehingga perkembangan pariwisata tidak mengancam kelestarian subak dan sebaliknya. Saat ini, wisata subak cenderung hanya berfoto dengan latar belakang sawah. Namun, wisata subak dapat dikembangkan dengan cara mengajak wisatawan untuk ikut

bertani (menanam/memanen padi) dan memberikan sedikit sosialisasi mengenai organisasi subak dan Tri Hita Karana. Adanya wisata berbasis subak ini akan meningkatkan daya tarik subak sebagai destinasi wisata Bali sekaligus memberikan pengetahuan kepada para wisatawan tentang arti dan pentingnya subak bagi kebudayaan Bali sehingga diharapkan tidak hanya masyarakat Bali, namun wisatawan juga memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian subak. Keikutsertaan wisatawan baik domestik maupun manca negara dalam menanam padi, terlebih lagi memiliki pengetahuan yang baik tentang subak, diharapkan menjaga luas lahan pertanian subak.

- b. Pengembangan zonasi yang mengatur tentang penggunaan lahan di wilayah pertanian subak. Zonasi meliputi zona inti dan zona penyangga. Zona inti merupakan area pertanian yang ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sedangkan Zona penyangga merupakan area dengan peruntukan melindungi zona inti dari kemungkinan pemanfaatan ruang disekitar kawasan yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Dengan adanya zonasi ini, diharapkan pihak berwenang dapat membuat perencanaan pembangunan di sekitar subak secara lebih matang. Apabila pembangunan telah masuk ke daerah penyangga, maka pemerintah dapat melakukan intervensi, sehingga kelestarian subak dapat tetap terjaga.
- c. Perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anggota organisasi subak dan bantuan sarana dan prasarana pertanian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar kesejahteraan petani subak dapat bersaing dengan penghasilan

dan/atau kesejahteraan dengan profesi lain atau sektor lainnya. Metode bantuan dapat bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Kebijakan *top-down* dapat diambil untuk memberikan subsidi pupuk dan bibit sehingga harga produksi bisa ditekan dan menjadikan kenaikan kesejahteraan petani subak. Kebijakan *bottom up* diawali dengan pengajuan proposal dari organisasi subak yang berisi tentang rencana pengembangan subak di wilayah masing-masing ke depannya. Adanya bantuan sarana prasana, misalnya pupuk, bibit, dan alat pertanian diharapkan mampu menekan biaya produksi dan keuntungan yang didapat petani menjadi lebih banyak, sehingga para petani menjadi lebih sejahtera dan termotivasi untuk melestarikan subak.

- d. Sosialisasi di kalangan petani muda mengenai pentingnya subak yang menganut Tri Hita Karana sebagai bentuk kearifan lokal bahkan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Hal ini menjadi penting, sebab petani muda adalah penerus organisasi subak. Apabila petani muda tidak memahami pentingnya subak yang merupakan kebudayaan asli Bali, maka dikhawatirkan tidak ada lagi penerus organisasi subak sehingga kelestarian subak semakin terancam.

PUSTAKA ACUAN

- Aryawan, I Putu Soni et al. Peranan Subak dalam Aktivitas Pertanian Padi Sawah (Kasus di Subak Dalem, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (JAA)*. Januari 2013. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA/issue/view/738>. Diakses: 6 Mei 2019.
- BPS. 2019. *Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2017*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2018. *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2018. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS Provinsi Bali. 2018. *Bali Dalam Angka 2018*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- BPS. 2014. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.
- BPS Provinsi Bali. 2014. *Bali Dalam Angka 2014*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- BPS. 2008. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2008*. Jakarta: BPS.
- BPS Provinsi Bali. 2008. *Bali Dalam Angka 2008*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Budiarto, Muhammad Hidayat. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan Irigasi (Subak) Di Lingkungan Masyarakat Bali Pasca Diresmikan Sebagai Warisan Budaya. *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2. Oktober 2016. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/11375/11023>. Diakses: 10 Juni 2019.
- Diarta, I Ketut Surya., dan I Made Sarjana. Strategi Pengembangan Subak Padanggalak Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kota Denpasar Bali. *Media Konservasi* Vol. 23 No. 3. Desember 2018. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/viewFile/24933/16205>. Diakses: 6 Mei 2019.

- Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya. 2013. Rencana Pengelolaan Lansekap Budaya Provinsi Bali. Jakarta: Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.
- Kamandalu, A.A.N.B et al. Model Pemberdayaan Subak Melalui Penerapan Prima Tani Dalam Rangka Mewujudkan Subak Sebagai Lembaga Usaha Ekonomi dan Agribisnis dalam Universitas Gadjah Mada dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. 2012. Penguatan Agribisnis Perberasan Guna Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani. Yogyakarta: Magister Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.
- Mahalli, Zainal. 2016. Studi Tentang Tradisi Bunceng Umat Konghucu Di Tempat Ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio Tuban Jawa Timur. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Martiningsih, Ni Gst.Ag.Gde Eka. Pelestarian Subak Dalam Upaya Pemberdayaan Kearifan Lokal Menuju Ketahanan Pangan Dan Hayati. Jurnal Bumi Lestari Vol. 12 No. 2. Agustus 2012. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/download/4821/3622/>. Diakses: 8 Mei 2019.
- Media Indonesia. 17 April 2019. Status Warisan Dunia Subak Terancam Dicabut. <https://mediaindonesia.com/read/detail/230162-status-warisan-dunia-subak-terancam-dicabut>. Diakses: 6 Mei 2019.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. 2016. Subak Bali Merupakan Manifestasi Dari Tri Hita Karana. Gianyar: Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Pitana, I Gde. Industri Budaya Dalam Pariwisata Bali: Reproduksi, Presentasi, Konsumsi, dan Konservasi Kebudayaan dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Universitas Udayana. 2006. Bali Bangkit Kembali. Jakarta: Depbudpar dan Unud.
- Pujaastawa, IBG. 2014. Kebudayaan Bali. https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/D3_19621118198803100125081404810makalah-kebudayaan-bali.pdf. Diakses: 7 Mei 2019. Makalah.
- Riyandi, Saugi. 12 Oktober 2018. Anak Muda Tak Mau Jadi Petani, Lahan Pertanian Semakin Berkurang. <https://www.jawapos.com/ekonomi/12/10/2018/anak-muda-tak->

- [mau-jadi-petani-lahan-pertanian-semakin-berkurang/](#). Diakses: 22 Juli 2019
- Sari, Rofiana Fika. 23 Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli dan Secara Umum. November 2018. <https://www.idpengertian.com/pengertian-kebudayaan/>. Diakses: tanggal 7 Mei 2019.
- Sirtha, I Nyoman. 2016. Subak di Era Globalisasi. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/1ff697d4a9f7186e12e2dc61a5c8e381.pdf. Diakses: 8 Mei 2019. Penelitian Mandiri.
- Suartika, Gusti Ayu Made. Substansi Budaya Dalam Kebijakan Tata Ruang di Bali. Jurnal Humanoria Vol. 22 No. 3. Oktober 2010. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11833>. Diakses: 7 Mei 2019.
- Sukarelawanto, Ema. 30 Juli 2018. Generasi Muda Bali Enggan Bertani, Ini Penyebabnya. <https://surabaya.bisnis.com/read/20180730/537/821945/generasi-muda-bali-enggan-bertani-ini-penyebabnya>. Diakses: 22 Juli 2019
- Teng, Muhammad Bahar Akkase. Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). Jurnal Ilmu Budaya Vol. 5 No. 1. Juni 2017. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/2360>. Diakses: 7 Mei 2019.
- Titib, I Made. Dinamika Agama Hindu dan Kebudayaan Bali dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Universitas Udayana. 2006. Bali Bangkit Kembali. Jakarta: Depbudpar dan Unud.
- Umarayasa, Putu Budi. 2018. Subak: Sistem Pengairan Sawah (Irigasi) Tradisional Bali. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/subak-sistem-pengairan-sawah-irigasi-tradisional-bali-25>. Diakses: 10 Juni 2019
- Windia, Wayan. Kebertahanan Subak di Era Globalisasi. Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang Vol. 1 No. 2. Agustus 2018. <http://bappeda.baliprov.go.id>. Diakses: 6 Mei 2019.
- Windia, Wayan et al. Transformasi Sistem Irigasi Subak Yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.

November 2012.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4078>. Diakses: 6
Mei 2019.

Yuliati, Dewi. Kebudayaan Lokal Versus Kebudayaan Global: Hidup Atau Mati?. Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol. 11 No. 1. Februari 2007.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/3564/3204>. Diakses: 7 Mei 2019.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ISBN 978-602-8449-22-9

